

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**EVALUASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEI
SIMPANG DUA KEAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN
KAMPAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Pekanbaru



**AHMAD NURHUDA
NPM : 137310705**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM BEMBIMBING

Nama : Ahmad Nurhuda
NPM : 137310705
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di ujikan.

Pekanbaru, 05 Maret 2020

Di Setujui Oleh :

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Budi Muliando, S.IP., M.Si

Pembimbing


Dr. H. Panca Setyo Prihatin., S.IP., M.si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Ahmad Nurhuda
NPM : 137310705
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

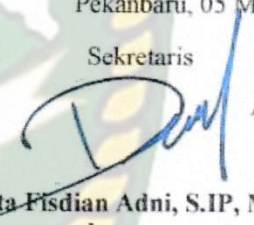
Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 05 Maret 2020

Ketua

Sekretaris



Dr. H. Panca Setyo Prihatin SIP, M, Si



Dita Fisdian Adni, S.IP, M.IP

Mengetahui

Anggota

Wakil Dekan Bagian Akademik


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Nina Yuslaini, S.IP., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 004/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Ahmad Nurbuda**
N P M : 137310705
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sie Simpang Dua Kecamatan Kampar Hilir Kabupaten Kampar..

1. Dr.H.Panca Setyo Prihatin.S.IP.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian Adni.,S.IP.,M.IP Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Nina Yuslaini.,S.IP.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Agung Wicaksono.,MPA Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 05 Februari 2020
An: Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 004 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 05 Feb 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 06 Feb 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ahmad Nurhuda
NPM : 137310705
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Evaluasi Program Badan usaha milik desa di desa sie simpang dua kecamatan Kampar hilir kabupaten kampar*

Nilai Ujian : Angka : " 76,3 " ; Huruf : " B+ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin S.IP., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Nina Yuslimi, S.IP., M.Si	Anggota	3. 
4.	Agung Wicaksono, MPA	Notulen	4. 

Pekanbaru, 06 Februari 2020

An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Ahmad Nurhuda
NPM : 137310705
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.


Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai karya ilmiah.

Pekanbaru, 05 Maret 2020

Ketua

Sekretaris


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP

Mengetahui

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Wakil Dekan Bagian Akademik

Ketua


H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulisan proposal ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapat bantuan, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:.

1. Bapak Dr. H. Moriss Adidi Yogia, S.Sos.,M.Siselaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik.
2. Bapak Budi Muliando,S.IP.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. H. Panca Setyo Prihatin., S.IP.,M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, masukan, dan saran, dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau. yang telah memberikan pengetahuan dan arahan selama belajar di Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si Selaku Dosen Penasehat Akademik yang juga telah banyak memberikan nasehat serta ilmu pengetahuan selama masa studi.

6. BapakkepalaDesa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir yang telah memberikan ijin dan menyediakan semua data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.
7. Kedua Orang tua ayahanda Suhadi, Ibunda Muryani yang selalu memberikan nasihat, masukan, doa, serta kasih sayang sehingga penulis selalu termotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh kakakadik, Muhammad Solihin, ChoirulA rifin, Khadiroh Mahksunnah, Purwati, Ahmad Nurudin, dan Adinda Erna Erviana, serta seluruh keluarga besar.
9. Semua teman-teman angkatan 2013 yang telah berdinamika bersama selama proses perkuliahan.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan proposal ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa sebenarnya proposal ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga proposal ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pekanbaru, 08 Januari 2020

Ahmad Nurhuda

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
A. Konsep Teori.....	8
1. Konsep Kebijakan.....	8
a. Kebijakan.....	8
b. Kebijakan publik.....	10
2. Teori Evaluasi.....	12
a. Jenis jenis Evaluasi.....	13
b. Fungsi Evaluasi.....	14
c. Model Evaluasi.....	15
d. Indikator Keberhasilan Evaluasi Evaluasi.....	19
3. Teori Evaluasi Kebijakan.....	21
4. Konsep Badan Usaha Milik Desa.....	22
a. Dasar Hukum BUMDes.....	23
b. Maksud Pendirian BUMDes.....	23
c. Tujuan Pendirian BUMDes.....	24
d. Pendirian BUMDes.....	25
B. Definisi Konsep.....	26
C. Penelitian Terdahulu.....	27
D. Kerangka berfikir.....	31
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	33
1. Objek Penelitian.....	33
2. Subjek Penelitian.....	33
D. Jenis Data.....	33

1. Data Primer	33
2. Data Skunder	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Analisis Data	36
G. Rencana Penelitian	37
BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaaten Kampar	38
B. Desa Sei Simpang Dua	39
C. Pemerintahan Desa Sei Simpang dua	40
1. Stuktur Organisasi	40
2. Uraian Tugas dan Fungsi.....	41
BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Evaluasi Tahap Perencanaan	45
1. Tujuan program BUMDes	45
2. Kegiatan pendukung program	49
B. Evaluasi Tahap Pelaksanaan	52
1. Efisiensi, Efektif dan Konsisten	52
2. Pengorganisasian BUMDes	55
3. Ketenaga Kerjaan	57
4. Peraturan Perundangan.....	58
C. Evaluasi Tahap Pasca Pelaksanaan	58
1. Hasil Pengelolaan BUMDes	58
2. Efek dan Impek Program.....	63
BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tebel I.1. : Program Badan Usaha Milik Desa	4
Tabel II.1. : Penelitian terdahulu	27
Tabel III.1 : Informan Penelitian	34
Tabel III.2 : Rencana Penelitian	37
Tabel V. 1 : Program (Bumdes) Sei Simpang Dua	49
Tabel V.2 : Daftar Usaha Disekitar Bumdes Maju Bersama	52
Tabel V.3 : Data Pendapatan SHU BUMDes	60
Tabel V.4 : Data Alokasi SHU BUMDes Maju Bersama	61

Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1. : Kerangka Berfikir.....	31
Gambar IV.1 : Struktur Organisasi	40



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA
- LAMPIRAN II : HASIL WAWANCARA
- LAMPIRAN III : DOKUMENTASI
- LAMPIRAN IV : SURAT BALASAN MENYELESAIKAN PENELITIAN
- LAMPIRAN V : BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
- LAMPIRAN VI : BUKU BANK DESA



URAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Seminar Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Nurhuda
NPM : 137310705
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa Di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Atas naskah yang di daftarkan pda Ujian Seminar Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen pernyataan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Ujian Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak hanya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode peneliian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas Dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Seminar Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru 05 Maret 2020
Pelaku Pernyataan

Ahmad Nurhuda

EVALUASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA SEI SIMPANG DUA KECAMATAN KAMPAR KIRI HILIR KABUPATEN KAMPAR

ABSTRAK

Oleh :

AHMAD NURHUDA

NPM :137310705

Dalam upaya untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dibutuhkan pembangunan ekonomi yang seimbang. Sehingga meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Harus ada peningkatan perekonomian melalui gerakan dan penemuan-penemuan baru, terlebih banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini dilakukan agar desa tidak hanya bergantung terhadap pemerintah pusat, dengan demikian desa tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Salah satu inovasinya adalah pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dimana dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan key informan yaitu direktur BUMDes maju bersama Sei Dua.

Hasil Penelitian ini adalah 1) Evaluasi Tahap Perencanaan Mewadahi setiap unit usaha yang ada di Desa Ponjong baik berupa jasa ataupun barang dan mendapatkan keuntungan dari unit usaha sebanyak banyaknya sehingga dapat menjadi serapan keuangan Desa berupa pendapatan asli Desa atau PADes. 2) Evaluasi Tahap Pelaksanaan Dilakukan dengan merencanakan kembali program-program yang belum berjalan dan mengawasi serta mempertahankan program yang sudah berjalan dengan melihat keefektifan program yang dijalankan masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. 3) Evaluasi Pasca Pelaksanaan memberi perubahan secara ekonomi usaha masyarakat penyedia barang kebutuhan seperti penjual sembako, makanan, minuman, bahan bakar kendaraan, oleh oleh dan souvenir sangat mendorong pendapatan masyarakat kemudian membuk lapangan kerja bagi masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Kata Kunci : BUMDes, Evaluasi, Masyarakat Desa

**EVALUATION OF VILLAGE BUSINESS AGENCY PROGRAMS
IN SEI SIMPANG DUA VILLAGE KAMPAR KIRI HILIR
KAMPAR DISTRICT**

ABSTRACT

By :

AHMAD NURHUDA

NPM :137310705

In an effort to increase the prosperity and welfare of the people needed a balanced economic development. Thus increasing the prosperity and welfare of the people. There must be an increase in the economy through movements and new discoveries, especially the abundance of natural resources and adequate human resources. This is done so that the village does not only depend on the central government. thus the village grows into a force capable of delivering the community towards prosperity and prosperity. One of the innovations was the establishment of the BUMDes (Village-Owned Enterprises) program which was formed based on the needs and potential of the village.

This study aims to determine how the evaluation of the Village Owned Enterprise Program in Sei Simpang Dua Village, Kampar Kiri Hilir District, Kampar Regency. The research method used in this study was a qualitative study using key informants that the BUMDes director advanced with Sei Dua.

The results of this study are 1) Evaluation of the Planning Phase accommodating each business unit in Ponjong Village in the form of services or goods and getting as much profit from the business units so that it can become a Village financial absorption in the form of Village original income or PADes. 2) Evaluation of the Implementation Stage Performed by re-planning programs that have not yet run and supervising and maintaining programs that have been running by looking at the effectiveness of the programs carried out by the people of Sei Simpang Dua Village, Kampar Kiri Hilir District, Kampar Regency. 3) Post-Implementation Evaluation gives economic changes to the business of community providers of goods such as groceries, food, beverages, vehicle fuel, by and soupenir greatly encourages community income and then opens up employment opportunities for the people of Sei Simpang Dua Village Kampar Kiri Hilir District Kampar Regency.

Keywords : BUMDes, Evaluation, village community

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia saat ini telah memasuki era desentralisasi menjadikan daerah memiliki otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur segala urusan rumah tangganya sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah masing-masing. Sesuai dengan Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 yang mengatakan bahwa daerah memiliki kebebasan mengatur urusannya sendiri. Bertitik tolak dari aturan tersebutlah telah menjadikan suatu daerah memiliki wewenang untuk menjalankan pemerintahannya dengan otonom.

Menurut Noor Muhammad (2012) desentralisasi sebagai sebuah proyek dijalankan secara murni dan konsekuen, sehingga menciptakan kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, dan keamanan bagi rakyat sebuah bangsa. Karena semua komponen bangsa akan turut ambil bagian dalam pembangunan, sehingga segala kebijakan tidak lagi sentralistik yang hanya menunggu perintah, menjadikan bangsa ini menjadi tidak mandiri dalam melakukan aktivitas pembangunannya.

Pada saat otonomi daerah Desa mengalami perubahan makna yang awalnya sebagai simbol sebuah pemerintahan di Desa saja kini sudah ditambahi dengan mengurus dimana masyarakat berwenang mengatur dan mengurus secara langsung kepentingannya. Digunakannya desentralisasi pokok utama yang menjadi sorotan adalah ekonomi, dimana ekonomi menjadi hal pertama yang dijadikan tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Sewaktu belum berlakunya desentralisasi,

Desa lebih banyak menunggu instruksi maupun bantuan dari pemerintah pusat sehingga segala sesuatunya menjadi terbatas. Dengan demikian menjadikan desa tidak dapat berkembang secara mandiri dan kreatif dalam menumbuhkan perekonomian desa.

Dalam upaya peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat diperlukan adanya pembangunan ekonomi yang seimbang. Sehingga meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dengan meningkatkan perekonomian melalui gerakan dan penemuan-penemuan baru, terlebih banyaknya sumber daya alam dan sumber daya manusia yang memadai. Hal ini dilakukan agar desa tidak hanya bergantung terhadap pemerintah pusat. dengan demikian desa tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mengantarkan masyarakat menuju kemakmuran dan kesejahteraan. Bentuk inovasi yang dilakukan oleh masyarakat desa adalah pembentukan program BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dimana dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Badan Umum Bilik Desa atau BUMDes merupakan salah satu lembaga yang didirikan untuk meningkatkan usaha desa yang dapat dikelola oleh masyarakat desa dan pemerintahan desa dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa. BUMDes merujuk padapilar kegiatan ekonomi di desa dapat berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). BUMDes dapat berperan sebagai lembaga sosial yang mementingkan kepentingan masyarakat desa dengan meningkatkan kontribusinya untuk masuatakat desa sebagai penyedia pelayanan desa bagi masyarakat desanya.

Pada dasarnya BUMDes dikatakan sebagaikonsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Berikut ini yang bisa dilakukan oleh BUMDes yaitu:

1. Mengembangkan kemampuan sumber daya manusia agar mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
2. Mengintegrasiproduk-produk ekonomi desa agar memiliki nilai ekonomi yang baik dan dapat bersaing di pasar
3. Mewujudkanskala ekonomi yang kompetitif terhadap usaha ekonomi desa
4. Semakin menguatnya kelembagaan ekonomi desa.

Dasar Hukum pendirian BUMDes adalah Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 87 ayat (1) yang berbunyi, “Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDes,” dan ayat (2) yang berbunyi, “BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan,” dan ayat (3) yang berbunyi, “BUMDesa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan pelayanan umum untuk masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 87 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor. 6 tahun 2014 tentang Desa).

BUMDes dapat berpotensi sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa agardapat mensejahterahkan kehidupannya (Ridwan, 2013). Supaya masyarakat pedesaan dapat mengembangkan potensi, agar tidak dirugikan dan lebih diuntungkan, maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan (Robert, 2009). BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa adalah BUMDes Desa Sei Simpang

Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yang didirikan berdasarkan peraturan Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Nomor : 141/Kpts-SSD/II/2015/001 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sei Simpang dua Kecamatan kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar yaitu diantaranya adalah :

Tabel I.1. Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten kampar

No	Nama Program	Kegiatan	Keterangan
1	Simpan Pinjam	Memberikan pinjaman modal usaha pada masyarakat	berjalan
2	Usaha Air Mineral	Usaha air minum isi ulang yang di kelola masyarakat	sudah tidak berjalan
3	Perkreditan Furniture dan Elektronik	Tempat masyarakat dapat membeli furniture dan elektronik secara kredit	Sudah tidak berjalan
4	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi)	Toko penyedia bahan dan alat pertanian	Rencana
5	Pengelolaan Pasar Desa	Tempat jual beli masyarakat desa	berjalan
6	Penyebaran WiFi	Penyediaan jaringan internet secara gratis oleh pemerintah desa	berjalan
7	Pertamini	Tempat penjualan minyak	berjalan

Sumber :Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, 2019

Dari data dan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, ditemukan berbagai temuan yaitu

1. Ada program yang tidak berjalan lagi
2. Masih terdapat beberapa program yang masih direncanakan

Program yang sudah berjalan yaitu salah satunya adalah program Simpan pinjam, yang bertujuan untuk memberikan pinjaman modal usaha pada

masyarakat, pinjaman modal usaha diberikan pada masyarakat yang telah menjadi anggota simpan pinjam, dengan jumlah biaya pinjaman mencapai 10 juta, jumlah pinjaman ini disesuaikan dengan usaha yang dimiliki masyarakat desa, Pada program Pengelolaan Pasar Desa, dimana dimana BUMDes Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar menyediakan tempat dan fasilitas pasar bagi masyarakat untuk mempermudah membeli kebutuhan sehari-hari, tanpa harus ke pusat kota, pasar yang ada dan dikelola di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar diantaranya adalah, pasar Rabu, dan Pasar kaget. Sedangkan pada program Penyebaran WiFi yang ada di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dapat dikatakan juga sudah berjalan, kegiatan program ini ditandai dengan ketersediaan WiFi terbuka untuk masyarakat, sehingga masyarakat desa tidak lagi tertinggal dalam mencari informasi dan pengetahuannya, sedangkan pada program pertamini yang sedang berjalan, dimana BUMDes Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar telah menyediakan pertamini yang dijalankan oleh masyarakat dengan harga minyak sama seperti harga pada umumnya yang ditetapkan pemerintah, sehingga bagi masyarakat yang memiliki usaha tidak merasa keberatan mengenai harga bahan bakar untuk aktifitas kegiatan usaha mereka.

Dari ketujuh program yang dimiliki BUMDes Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, masih terdapat 1 program yang belum berjalan, yaitu Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi), program ini belum dilaksanakan berdasarkan hasil wawancara awal oleh pengurus

BUMDes pada 5 Agustus 2019, beliau mengatakan bahwa program Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) belum dapat berjalan karena pihak BUMDes belum mendapatkan mitra atau bantuan dan anggran untuk melaksanakan program ini. Dengan belum berjalanya program Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi), mengakibatkan masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar masih sangat kesulitan dalam mencari sarana produksinya, mengingat sebagian besar masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sangat membutuhkan sarana produksi panen sawit mereka.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “**Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penilian ini adalah untuk mengetahui, Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat menjadi rujukan dan referensi bagi penelitian ataupun karya tulis selanjutnya.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk mahasiswa khususnya mahasiswa Ilmu Pemerintahan sehingga dapat mengaplikasikannya di daerah masing-masing.

b. Manfaat Praktis

1. Peneliti ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pemahaman kepada pemerintah Desa khususnya di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar terkait Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam membuat kebijakan sehingga bisa sesuai dengan dan lebih baik untuk kebijakan terkait BUMDes selanjutnya.
3. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan masukan bagi pengelola dalam mengelola BUMDes yang lebih baik.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Konsep Teori

Dalam penelitian unsur yang paling utama adalah teori. Teori adalah rangkaian kalimat yang logis dari satu proposisi atau lebih. Terdiri dari konsep-konsep, definisi, acuan dan proposisi melalui penentuan hubungan antara variable dengan tujuan untuk menjelaskan (memprediksi) fenomena. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa konsep teori sebagai kerangka berfikir penulis yang adakaitannya dengan masalah yang diteliti, adalah sebagai berikut:

1. Konsep Kebijakan

a. Kebijakan

Konsep Kebijakan menurut Fedrikson dan Hart adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu sambil mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan / mewujudkan sasaran yang diinginkan (Tangkilisan, 2009:12). Pendapat lain berasal dari Woll yang menyebutkan bahwa kebijakan merupakan aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat (dalam Tangkilisan, 2009:2). Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan tindakan-tindakan atau keputusan yang kuat oleh pemerintah, dimana tindakan atau keputusan dimaksud memiliki pengaruh terhadap masyarakatnya.

Selanjutnya menurut Charles O. Jones istilah kebijakan (*policy term*) di gunakan dalam praktek sehari-hari namun di gunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda (Winarno, 2012:21).Istilah ini sering di pertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*) *standard*, proposal, dan *grand design*. berdasarkan konsep filosofis kebijakan merupakan serangkaian prinsip dan kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk kebijakan yang dipandang sebagai kebijakan pada suatu organisasi dengan harapan agar dapat mengetahui suatu program yang dijalankanj dengan mekanisme yang ingin dicapai sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.

Pendapat lain dikemukakan oleh Anderson yang mendefinisikan mendefinisikan kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang actor atau sejumlah actor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan(Winarno, 2012:21). Selain itu James E. Anderson dalam Wahab (2008:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Sedangkan menurut pendapat Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah di lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan(Wahab, 2008:2)

Dari beberapa pendapat ahli mengenai kebijakan yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada hakekatnya studi tentang *studipolicy* (kebijakan) mencakup pertanyaan : apa, mengapa, siapa, di mana, dan bagaimana. Semua pertanyaan tersebut menyangkut tentang masalah yang akan dihadapi lembaga-lembaga yang bertugas mengambil keputusan yang menyangkut; isi, cara atau prosedur yang ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil dan dilaksanakan.

b. Kebijakan Publik

Konsep kebijakan publik adalah keputusan atau seperangkat keputusan-keputusan dalam menghadapi situasi atau permasalahan, yang mengandung nilai-nilai tertentu, memuat ketentuan tentang tujuan, cara dan sarana serta kegiatan untuk mencapainya (Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2008:193), mengemukakan bahwa. Kebijakan publik dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga Pemerintah yang bertugas untuk menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan negara. Berdasarkan sudut pandang penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan publik berlangsung secara seluruhan dengan tatanan organisasi pemerintahan negara yang ada di seluruh wilayah negara dan berhadapan dengan permasalahan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa.

Menurut Carl I. Friedrich menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang disarankan seseorang, atau kelompok dalam pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan khalayak ramai dan

ditujukan unruk memanfaatkan potensi yang ada untuk mencapai tujuan tertentu (Winarno, 2009:16). Sedangkan menurut Carl Friedrich berkaitan dengan dimensi yang luas karena tidak hanya dipahami sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga oleh kelompok maupun oleh individu.

Selanjutnya menurut Chief J.O, kebijakan publik adalah suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang memengaruhi sebagian besar warga masyarakat (Abdul Wahab, 2009:6). Sedangkan menurut Nugroho (2008:124), kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi dalam merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan Publik adalah strategi untuk mengantarkan masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Selanjutnya menurut Dye kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh orang-orang yang adadi pemerintahan untuk mecapai tujuan yang diharapkan pada msyarakat dengan beberapa tahap dan proses dalam penyusunanya (Nugroho, 2009:256). Dalam proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji, sebuah kebijakan publik sering kali memiliki sifat penekanan yang tegas dan memaksa sifat inilah yang tidak membedakan antara organisasi pemerintahan dan swasta. Dengan kata lain kebijakan publik dituntut untuk kepentingan masyarakat luas. Diaman kebijakan tersebut akan dilegalkan atau

disahkan dan berbentuk hukum agar tidak dianggap lemah dan berjalan dengan efektif

Dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah sebuah kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (dalam hal ini adalah pejabat negara atau pejabat pemerintahan) dalam kaitannya dengan mengatasi problem yang ada di tengah-tengah masyarakat yang tentunya dengan menggunakan tahapan, metode dan cara-cara tertentu.

Pengertian implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang dapat secara langsung dioperasionalkan antara lain.

2. Teori Evaluasi

Terdapat tiga istilah yang sering digunakan dalam evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian (*test, measurement, and assessment*). Tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui respons seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan (Mardapi, dalam Widoyoko, 2014: 4).

a. Jenis-jenis Evaluasi

Menurut Suharto evaluasi terdiri dari beberapa jenis, jika dilihat dari pertahapannya, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (Apriliana, 2016:10-14):

1) Evaluasi Tahap Perencanaan

Evaluasi perencanaan yaitu suatu tahap di mana mengevaluasi suatu perencanaan pembuatan kebijakan dengan melihat perencanaan tersebut sebagai alternatif yang dapat dilakukan sebagai pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

2) Evaluasi Pada Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi adalah di mana kegiatan dalam tahap menganalisa suatu kebijakan yang telah dilakukan serta menenrukan apakah pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan perencanaan awal. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui apakah yang ingin dicapai sudah tepat dan bahwa program tersebut direncanakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Sedangkan monitoring bertujuan melihat pelaksanaan proyek sudah sesuai dengan rencana dan bahwa rencana tersebut sudah tepat untuk mencapai tujuan selain itu evaluasi melihat sejauh mana proyek masih tetap dapat mencapai tujuan, apakah tujuan tersebut sudah berubah dan apakah pencapaian program tersebut akan memecahkan masalah yang akan dipecahkan.

3) Evaluasi

Pada Tahap Pasca Pelaksanaan, adalah tahap dimana dilakukan evaluasi program yang telah dilaksanakan dan di evaluasi apakah sudah sesuai dengan target yang ditentukan, pada konsenyatahap pelaksanaan yang membedakannya terletak pada objek yang dinilai dengan yang dianalisa, dimana tingkat kemajuan pelaksanaan dibanding rencana tetapi hasil pelaksanaan dibanding dengan rencana yakni apakah dampak yang dihasilkan oleh pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang akan ingin dicapai.

b. Fungsi Evaluasi

Menurut Wahab terdapat tiga fungsi utama evaluasi dalam analisis kebijakan, yaitu (Apriliana, 2016 :10-14):

- 1) Evaluasi dapat memberi informasi yang salah dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Hal ini menjelaskan bahwa evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai.
- 2) Evaluasi juga dapat memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mendefenisikan dan mengoperasikan tujuan dan target.
- 3) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

- 4) Informasi tentang tidak memadai kinerja kebijakan yang dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan

c. Model Evaluasi

- 1) Evaluasi model Kirkpatrick

Model evaluasi yang dikembangkan oleh Kirkpatrick, dalam Widoyoko (2014: 8-12) dikenal dengan istilah “*Kirkpatrick four levels evaluation model*”. Evaluasi terhadap efektivitas program training menurut Kirkpatrick mencakup empat level evaluasi, yaitu: reaction, learning, behavior, result

- a) *Evaluating Reaction*

Mengevaluasi terhadap reaksi peserta training berarti mengukur kepuasan peserta (*customer satisfaction*). Program *training* dianggap efektif apabila proses training dirasa menyenangkan dan memuaskan bagi peserta training sehingga mereka tertarik termotivasi untuk belajar dan berlatih. Dengan kata lain peserta training akan termotivasi apabila proses training berjalan secara memuaskan bagi peserta yang pada akhirnya akan memunculkan reaksi dari peserta yang menyenangkan. Sebaliknya apabila peserta tidak merasa puas terhadap proses training yang diikutinya maka mereka tidak akan termotivasi untuk mengikuti training lebih lanjut. Kepuasan peserta training dapat dikaji dari beberapa aspek, yaitu materi yang diberikan, fasilitas yang tersedia, strategi penyampaian materi yang digunakan oleh instruktur, media

pembelajaran yang tersedia, jadwal kegiatan sampai menu dan penyajian konsumsi yang disediakan. Dalam mengukur reaksi dapat dilakukan dengan reaction sheet dalam bentuk angket sehingga lebih mudah dan lebih efektif.

b) *Evaluating Learning*

Menurut Kirkpatrick, dalam Widoyoko (2014: 8-12) *learning can be defined as the extend to which participans change attitudes, improving knowledge, and/or increase skill as a result of attending the program*. Ada tiga hal yang dapat instruktur ajarkan dalam program training, yaitu pengetahuan, sikap maupun ketrampilan. Peserta training dikatakan telah belajar apabila pada dirinya telah mengalami perubahan sikap, perbaikan pengetahuan maupun peningkatan ketrampilan. Oleh karena itu untuk mengukur efektivitas program *training* maka ketiga aspek tersebut perlu untuk diukur. Tanpa adanya perubahan sikap, peningkatan pengetahuan maupun perbaikan ketrampilan pada peserta training maka program dapat dikatakan gagal. Penilaian *evaluating learning* ini ada yang menyebut dengan penilaiiah hasil (*output*) belajar.

c) *Evaluating Behavior*

Evaluasi pada level ke 3 (evaluasi tingkah laku) ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap pada level ke 2. Penilaian sikap pada evaluasi level 2 difokuskan pada perubahan sikap yang terjadi pada saat kegiatan training dilakukan sehingga lebih bersifat internal,

sedangkan penilaian tingkah laku difokuskan pada perubahan tingkah laku setelah peserta kembali ke tempat kerja. Apakah perubahan sikap yang telah terjadi setelah mengikuti training juga akan diimplementasikan setelah peserta kembali ke tempat kerja, sehingga penilaian tingkah laku ini lebih bersifat eksternal. Perubahan perilaku apa yang terjadi di tempat kerja setelah peserta mengikuti program training. Dengan kata lain yang perlu dinilai adalah apakah peserta merasa senang setelah mengikuti training dan kembali ke tempat kerja? sebagaimana peserta dapat mentrasfer pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diperoleh selama training untuk diimplementasikan di tempat kerjanya. Karena yang dinilai adalah perubahan perilaku setelah kembali ke tempat kerja maka evaluasi level 3 ini dapat disebut sebagai evaluasi terhadap outcomes dari kegiatan training.

d) *Evaluating Result*

Evaluasi hasil dalam level ke 4 ini difokuskan pada hasil akhir (*final result*) yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program. Termasuk dalam kategori hasil akhir dari suatu program training di antaranya adalah kenaikan produksi, peningkatan kualitas, penurunan biaya, penurunan kuantitas terjadinya kecelakaan kerja, penurunan *turnover* dan kenaikan keuntungan. Beberapa program mempunyai tujuan meningkatkan moral kerja maupun membangun teamwork yang lebih baik.

Dengan kata lain adalah evaluasi terhadap impact program. Tidak semua impact dari sebuah program dapat diukur dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu evaluasi level 4 ini lebih sulit di bandingkan dengan evaluasi pada level-level sebelumnya.

2) Evaluasi Model CIPP

Konsep evaluasi model CIPP (*Context, Input, Proses and Product*) pertama kali ditawarkan oleh Stufflebeam pada tahun 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA (*the Elementary and Secondary Education Act*). Konsep tersebut ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki. *The CIPP approach is based on the view that the most important purpose of evaluation is not to prove but to improve* (Madaus, Scriven, Stufflebeam, dalam Widoyoko (2014: 8-12)). Evaluasi pada model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, manajemen, perusahaan sebagainya serta dalam berbagai jenjang baik itu proyek, program maupun institusi. Dalam bidang pendidikan Stufflebeam menggolongkan sistem pendidikan dengan 4 dimensi, yaitu *context, input, process* dan *product*, sehingga model evaluasi yang ditawarkan diberi nama CIPP model yang merupakan singkatan ke empat dimensi tersebut. Nana Sudjana & Ibrahim, dalam Widoyoko (2014: 8-12) menterjemahkan masing-masing dimensi tersebut dengan makna sebagai berikut:

- a) *Context* situasi atau latar belakang yang mempengaruhi jenis-jenis tujuan dan strategi pendidikan yang akan dikembangkan dalam sistem yang bersangkutan, seperti misalnya masalah pendidikan yang dirasakan, keadaan ekonomi negara, pandangan hidup masyarakat dan seterusnya.
- b) *Input* sarana/modal/bahan dan rencana strategi yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan.
- c) *Process* pelaksanaan strategi dan penggunaan sarana/modal/ bahan di dalam kegiatan nyata di lapangan.
- d) *Product* hasil yang dicapai baik selama maupun pada akhir pengembangan sistem pendidikan yang bersangkutan.

d. Indikator Keberhasilan Evaluasi

Menurut Kunarjo, dalam Putera (2012: 20-23) mengemukakan bahwa unuk mengevaluasi suatu program, tahap pertama yang harus dilakukan adalah mendesain kegiatan program yang bersangkutan. Evaluasi program yang baik, memerlukan langkah yang sistematis, terarah, dan konsisten. Untuk itu perlu ditentukan lebih dulu hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tujuan Program yaitu tujuan akhir atau apa yang diharapkan sebagai hasil akhir suatu pembangunan program, dan terkait dengan tujuan yang telah direncanakan semula.
- 2) Kegiatan Pendukung Program Proyek yang menjadi pendukung program adalah sarana dan prasarana yang merupakan variabel penunjang dalam rangka pencapaian sasaran.

3) Bagaimana Prosedur Pelaksanaannya

Prosedur pelaksanaan adalah organisasi yang di rancang secara efisien, efektif, dan konsisten untuk melaksanakan program, yang meliputi pengorganisasian, ketenagakerjaan, dan peraturan perundangan.

4) Hasil Yang Diharapkan pada setiap Proyek Hal lain yang perlu ditentukan adalah menetapkan output dari masing- masing proyek yang bersangkutan yang merupakan variabel penunjang agar sasaran program keseluruhan dapat tercapai.

5) Memperkirakan *Effect* dan Impact Suatu Program itu sendiridalam memperkirakan *effect* dan impact suatu program mungkin yang paling sulit ditentukan. Tapi, dengan melakukan survei, wawancara dengan masyarakat, penentuan sampling dan evaluasi data statistik, dapat diketahui *effect* dan impact program tersebut. Dari teori yang telah di paparkan di atas, peneliti menggunakan teori Kunarjo sebagai tolak ukur dalam meneliti Evaluasi, karena di nilai lebih akurat dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

3. Teori Evaluasi Kebijakan

Menurut Anderson evaluasi kebijakan adalah kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi kebijakan dipandang sebagai bentuk kegiatan fungsional. Yang berarti, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja melainkan kepada seluruh proses kebijakan. Sedangkan menurut W. Dunn, evaluasi memiliki arti yang berhubungan, masing-masing menunjuk pada

aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi mencakup : kesimpulan, klarifikasi, kritik, penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Evaluasi terdapat beberapa fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kriteria kebijakan yaitu, seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan dan target tertentu telah dicapai. Kedua, evaluasi memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai ini dapat diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target. Nilai serta dikritik yang menanyakan secara sistematis kepantasan tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Selanjutnya ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan. Evaluasi dapat juga menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain (Bardach, E. 2008).

Evaluasi memiliki dua aspek yang saling berhubungan; penggunaan berbagai macam metode untuk memantau hasil kebijakan publik, program, dan aplikasi serangkaian nilai untuk menentukan kegunaan hasil ini terhadap beberapa orang, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. Dapat dilihat bahwa aspek

yang saling berhubungan dapat menunjukkan kehadiran fakta dan premis-premis nilai di dalam setiap tuntutan *evaluative*. Namun banyak aktivitas yang diterangkan sebagai “evaluasi” dalam analisis kebijakan pada dasarnya bersifat *non-evaluatif* yaitu dalam bentuk aktivitas-aktivitas yang ditekankan pada produksi tuntutan *designative* (faktual) ketimbang tuntutan *evaluative*. Sehingga dibutuhkan suatu pendekatan untuk “penelitian evaluasi” atau “evaluasi kebijakan” (Bardach, E. 2008).

4. Konsep Badan Usaha Milik Desa

Pembentukan BUMDes diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 213 ayat 1 menyebutkan bahwa Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa. Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 6 Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUMDesa, adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Peraturan Kabupaten Kampar nomor 5 Tahun 2010 Pasal 2 menyatakan, Badan usaha milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah lembaga usaha yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh Desa serta bersifat mencari keuntungan.

a. Dasar Hukum BUMDes

Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh Undang Undang 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah kemudian Undang-Undang No 6 Tahun

2014 Tentang Desa. diperinci lagi dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

b. Maksud Pendirian BUMDes

Dengan berdirinya BUMDesa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi No 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 yaitu Pendirian BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar Desa. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga Desa. Selain itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat desa. Dengan pendirian BUMDes dimaksudkan untuk menumbuh suburkan kegiatan pelaku ekonomi di pedesaan. Dimana ketika pertumbuhan ekonomi baik di sebuah Desa maka begitu pula pertumbuhan ekonomi di Kabupaten. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten baik maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi juga akan baik dan juga seterusnya. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi di pengaruhi dari bagaimana ekonomi pedesaan dibangun sehingga akan berdampak kepada semua sektor. Berdasarkan asumsi tersebut maka sudah seharusnya eksistensi ekonomi pedesaan diperhatikan.

c. Tujuan Pendirian BUMDes

Berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 3 pendirian BUMDes bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa.
- 2) Mengoptimalkan aset Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa.
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa.
- 4) Menembangkan rencana kerja sama usaha antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga.
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
- 6) Membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa.
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara perbaikan pelayanan upemerintah, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa dengan tujuan bertujuan untuk :
 - a) Mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa;
 - b) Meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;
 - c) Mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal; dan
 - d) Meningkatkan pendapatan asli desa.

d. Pendirian BUMDes

Dalam pembentukan Badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha Desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa, sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 213 yang menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa” Badan Usaha Milik Desa muncul sebagai sebuah pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi pedesaan berdasarkan potensi dan kebutuhan desa. BUMDes memiliki sistem kerja dimana BUMDes untuk memfasilitasi segala bentuk usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional. BUMDes memiliki paradigma bahwa segala bentuk usaha dari desa, oleh desa dan untuk desa. Hal ini menjadikan usaha masyarakat menjadi efektif dan produktif dimana segala bentuk usaha ekonomi desa dapat dikelola dengan maksimal. Berangkat dari kebutuhan desa dalam mengelola perekonomiannya maka pemerintah berawal dari Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah kemudian Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Semakin serius dalam mengelola dan mengembangkan BUMDesa. Dengan harapan hadirnya BUMDesa ini menjadi stimulus dalam mengembangkan perekonomian desa.

B. Definisi Konsep

1. Evaluasi merupakan proses pengukuran atau penaksiran suatu kegiatan sejauh mana dilaksanakan, berdasarkan suatu acuan yang disusun melalui tahapan tahapan, dimulai dengan tahapan perencanaan untuk menentukan mencapai skala prioritas yang diinginkan, kemudian tahapann pelaksanaan evaluasi didasarkan pada sejauhmana ketepatan atau capaian pada pelaksanaan dan terakhir evaluasi pasca pelaksanaan yang mengukur seberapa berhasil suatu kegiatan sehingga dapat disimpulkan hasilnya.
2. Badan Usaha Milik Desa Badan Usaha Milik Desa adalah suatu wadah atau tempat memiliki legalitas dan menaungi segala sesuatu kebutuhan Desa yang didasari pada potensi dan sumberdaya sekitar. Badan Usaha Milik Desa dibentuk guna memfasilitasi pusat kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajianterdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, kajian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Kajian terdahulu penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel II.1. Kajian Terdahulu

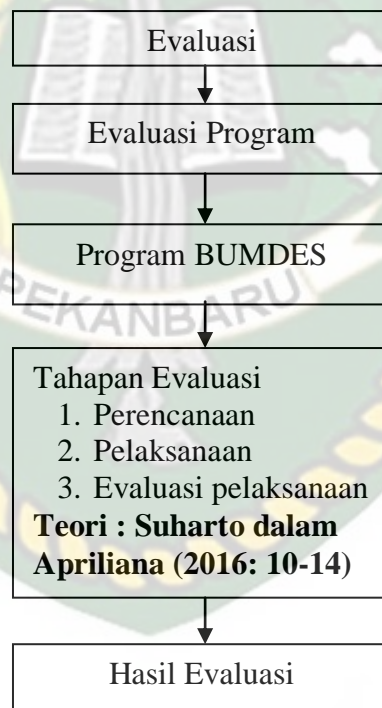
No	Peneliti	Judul dan Tahun Penelitian	Sumber	Hasil
1.	Eva Silvana	Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sungai Ungar Utara Kecamatan Kundur Utara Kabupaten Karimun (2017)	Jurnal Politik Muda, Vol. 2 No. 1, Januari - Maret 2017, 112 -102	program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sungai Ungar Utara belum mampu untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan masyarakat Desa Sungai Ungar Utara. Jenis usaha yang dapat terealisasi hanya 1 (satu unit) yaitu simpan pinjam. Satu program BUMDes Sungai Ungar Utara yang dapat terlaksana belum mampu berjalan dengan baik dan mengalami kemacetan sejak akhir tahun 2015. Program BUMDes Sungai Ungar Utara belum mampu memberdayakan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di Desa Sungai Ungar Utara. Hal ini karena belum mampu menjadi wadah pembelajaran masyarakat untuk berusaha dan membuka lapangan pekerjaan.
2	Puguh Budianto	Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor) (2016)	Jurnal Politik Muda, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2016, 116 -125	Pada proses implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa, banyak faktor yang mempengaruhi. Adanya kepentingan aktor pelaksana kebijakan yang memengaruhi hasil kebijakan tersebut, baik kepentingan individu maupun kelompok. Karakteristik lembaga pemerintah desa berpengaruh terhadap hasil implementasi, lembaga yang tertutup menghambat implementasi dan lembaga yang terbuka cenderung mendorong pelaksanaan kebijakan. Dalam mendorong kepatuhan pelaksana kebijakan, pemerintah desa mengadakan evaluasi dan juga

				adanya Laporan Pertanggungjawaban melihat pelaksanaan kebijakan. Peran dan respon pemerintah desa berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Badan Usaha Milik Desa.
3	Dendhi Agung Nugroho	Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung	JESP-Vol. 7, No 2 Nopember 2015 ISSN 2086-1575	penerapan program Bumdes di desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung sudah cukup bagus terbukti dengan hasil wawancara terhadap masyarakat desa terutama kategori keluarga RTM yang cukup puas dengan penerapan program Bumdes selama setahun ini. Selain itu juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja Bumdes desa Babadan. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: Bumdes menyusun misi yang jelas yaitu mensejahterakan kehidupan ekonomi masyarakat Babadan utamanya masyarakat kategori Rumah Tangga Miskin (RTM). Untuk mewujudkan harapan itu Bumdes membangun unit-unit usaha seperti unit Simpan Pinjam, unit Kredit Sepeda Motor, unit sektor riil penyewaan lahan bengkok desa, dan unit. Unit-unit usaha yang mereka bentuk berorientasi kedepan untuk membantu masyarakat terutama dalam hal aspek permodalan, pemenuhan kebutuhan pokok, dan juga membuka lapangan pekerjaan walaupun tidak begitu banyak.
4	Robiatul Adawiyah	Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek	Volume 6, Nomor 3, September – Desember 2018ISSN 2303 - 341X	Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten

		<p>Modal Sosial (Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)</p>		<p>Sidoarjo) telah melaksanakan pengembangan organisasi dengan sangat baik dengan didukung adanya aspek modal sosial. Modal sosial menjadi aspek yang sangat penting dalam kegiatan pengembangan organisasi karena memiliki hubungan yang erat kaitannya dengan masyarakat. Terutama diberbagai kegiatan yang ada di BUMDes Surya Sejahtera. Tanpa adanya modal sosial yang ditanamkan maka tidak akan terjalin hubungan yang baik antara pengurus dengan masyarakat Desa Kedungturi</p>
5	Khairul Amri	<p>Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)</p>	<p>Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 13, Nomor 3, Juli 2018: 295-299</p>	<p>evaluasi pelaksanaan program BUMDes secara keseluruhan sudah terlaksana dengan baik, namun belum maksimal. Dampak yang kurang baik dari program ini adalah biaya langsung. Sementara pada indikator lain seperti sasaran kebijakan, di luar sasaran kebijakan, kondisi sekarang dan akan datang dan biaya tidak langsung sudah terlaksana dengan baik.</p>

D. Kerangka Berfikir

Penelitian evaluasi kebijakan untuk mengetahui bagaimana dampak yang dapat ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Dengan adanya evaluasi dampak kebijakan diharapkan juga memberikan pengaruh terhadap perumusan kebijakan dikemudian hari. Sehingga pentingnya evaluasi dampak ini untuk melihat apakah suatu kebijakan sudah sesuai dengan kondisi dan masyarakat yang terkena langsung kebijakan tersebut. Gambar kerangka pemikiran dalam penelitian disajikan dalam bagan berikut.



Gambar II.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Yusuf (2014: 23), penelitian kualitatif adalah suatu strategi inquiry yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena, fokus dan multimetode, bersifat alamidan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari definisi yang sederhana penelitian kualitatif yaitu menemukan jawaban terhadap suatu pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis.

Selanjutnya Menurut Shank (2002) dalam Yusuf (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif sebagai sebuah penyelidikan empiris yang sistematis terhadap makna. Sistematis dalam konteks ini mengacu sebagai direncanakan, tertib dan umum serta sesuai dengan aturan. Dengan demikian peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif agar dapat mendeskripsikan yang terjadi di lapangan. Peneliti akan menggambarkan tentang objek dan kajian penelitian dengan cara mengumpulkan data-data yang ada di lapangan. Informasi yang telah disampaikan oleh informan kemudian dikumpulkan dan dianalisis, hasil analisis tersebut dapat berupa dekskripsi kemudian di interpretasi dan hasil akhirnya berupa laporan tertulis.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Menurut Nasution lokasi penelitian adalah situasi social yang terdiri dari tempat, pelaku dan kegiatan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa lokasi penelitian merupakan suatu tempat dalam memperoleh atau mendapatkan data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2019 sampai dengan Juni 2019.

C. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini melibatkan Pemerintah Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, Pengelola BUMDes Sei Simpang Dua dan masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

2. Subjek Penelitian

Sedangkan subjek penelitian ini adalah Evaluasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

D. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan. Peneliti akan menggali segala bentuk informasi yang diperoleh

langsung dari hasil pembicaraan atau wawancara. Informan penelitian ini adalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.1 Informant Penelitian

No	Jabatan	Keterangan
1.	Direktur Utama BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar	Key Informan
2.	Kaur Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar	Informan
3.	Masyarakat	Informan

Key Informan merupakan narasumber kunci dalam penelitian ini, yang mengetahui secara baik tentang permasalahan penelitian, sedangkan informan adalah narasumber pendukung yang ikut serta dalam permasalahan penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, baik dari dokumen, laporan tahunan maupun data-data yang mendukung lainnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data untuk mencari informasi guna mendapatkan data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik yaitu:

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara tatap muka (Suyanto & Sutinah, 2005: 69). Sebelum melaksanakan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bahan yang ingin dicari dan pertanyaan itu nantinya bisa dikembangkan. Setelah pertanyaan sudah tersedia barulah mencari narasumber atau informan, informan yang dipilih adalah informan yang benar-benar paham, mengetahui dan mengalami atau ikut terlibat dalam masalah yang ingin dipertanyakan. Informan dalam penelitian ini terdiri dari key informan dan informan pendukung.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam dan observasi langsung, yang diperkuat dengan sumber data sekunder dari data yang ada baik dari data perundangan, jurnal, ataupun laporan laporan yang mendukung dengan penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2012: 240). Teknik ini dilakukan penulis untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan arsip yang terdapat pada lokasi penelitian. Dapat berupa jurnal, buku, skripsi maupun laporan-laporan lain yang menunjang dalam penelitian.

F. Analisa Data

Menurut Sugiyono (2015 : 337-445) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktifitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan informasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data

Penyajian data didefinisikan sebagai pengorganisasian, penggabungan informasi, yang mempermudah peneliti untuk menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan melibatkan peneliti melakukan interpretasi data yang telah di display. Cara yang dilakukan meliputi perbandingan pengelompokan membuat pola dan melakukan triangulasi.

G.Rencana Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini terhitung dari bulan Januari hingga Oktober 2019.

Berikut ini jadwal pelaksanaannya:

Tabel III.2 Rencana Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2019																							
		Agus				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Melakukan penelitian dan pengambilan data																								
3	Penulisan proposal skripsi dan bimbingan																								
4	Seminar proposal																								
5	Wawancara																								
6	Pembuatan skripsi																								
7	Seminar skripsi																								
8	Perbaikan skripsi																								

Keterangan :



Yang telah dilakukan



Yang belum dilakukan

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

Wilayah kabupaten Kampar, Riau terletak pada 0 lintang utara; 1 lintang selatan, dan 101-02-101 56 Bujur Timur. Kabupaten Kampar dibentuk pada tahun 1956 dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 dengan luas 30.569,56 Km. setelah itu keluar undang-Undang nomor 1999 kabupaten Kampar pasca pemekaran dengan luas 10.983,64 Km. dengan batasan wilayah sebelah utara dengan kota pekanbaru dan kabupaten siak, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten kuantan seningi, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten rokan hulu, dan sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak. Kabupaten Kampar dibentuk pada tahun 1956 dengan undang-Undang nomor 12 tahun 1956. Setelah itu keluar undang-undang nomor 1999 Kabupaten pasca pemekaran. Kecamatan Kampar Kiri Hilir merupakan Kecamatan pemekaran dari kecamatan induk yakni Kampar kiri berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Kampar Kiri Hilir. Kecamatan Kampar Kiri Hilir memiliki Wilayah 432,4 Km. dengan batasan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Perhentian Raja
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Langgam
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri Tengah
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang

Jumlah desa dan Kelurahan dikecamatan Kampar Kiri Hilir adalah sebanyak 7

Desa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Kelurahan Sungai Pagar
2. Desa Sungai Petai
3. Desa Sei.Simpang dua
4. Desa Sungai Bungo
5. Desa Rantau Kasih
6. Desa Mentulik
7. Desa Bangun Sari
8. Desa Gading Permai

B. Desa Sei Simpang Dua

Desa Sei Simpang Dua merupakan desa di Kecamatan Kampir KiriHilir Kabupaten Kampar. Jarak tempuh antara desa Sei Simpang dua dengan ibukota Kabupaten Kampar (Bangkinang) adalah 90 KM dan jarak tempuh ke ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru) adalah 34 KM. Daerah ini merupakan daerah dataran rendah yang dilalui beberapa anak sungai yang bermuara ke sungai Kampar.

Batas Wilayah:

1. sebelah utara berbatasan dengan Hangtuah kecamatan Perhentian raja
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai pagar Kecamatan Kampar kiri hilir
3. Sebelah timur berbatasan dengan Pantai raja kecamatan Perhentian raja
4. Sebelah barat berbatasan dengan Sialang Kubang kecamatan Perhentian raja

C. Pemerintahan Desa Sei Simpang dua

Desa Sei Simpang dua mulai mempunyai sebuah pemerintahan sejak tahun 1946 yang pada saat itu disebut dengan wali nagari, pada tahun 1981 Desa Sei Simpang dua berubah status menjadi desa, dan kemudian pada tahun 2006 berubah menjadi kelurahan. Kelurahan Sei Pagar merupakan wilayah administratif di bawah kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

1. Struktur Organisasi



Gambar IV.1 Struktur Organisasi

Sumber : Desa Sei Simpang dua, 2019

2. Uraian Tugas dan Fungsi

a. Lurah

Tugas Pokok : Menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan ketertiban umum serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan.
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pelaksanaan kegiatan ke-Tata Usahaan.

b. Sekretaris

Tugas Pokok: Membantu Lurah melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, umum, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan. Fungsi :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Lurah.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan yang ditetapkan oleh Lurah
3. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan
4. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian
5. Pengelolaan administrasi keuangan
6. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggan kelurahan
7. Penyelenggaraan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara kedinasan lainnya di luar kegiatan yang telah tercakup dalam seksi lain.

c. Seksi Pemerintahan

Tugas Pokok : Membantu Lurah melaksanakan pembinaan pemerintahan kelurahan, dan pembinaan rukun warga Fungsi :

1. Penyusunan program dan kegiatan pemerintahan kelurahan
2. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kelurahan
3. Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan
4. Pengumpulan dan pengolahan data administrasi pemerintahan
5. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan perberhentian Kepala Lingkungan, Ketua RW dan Ketua RT
6. Pelaksanaan administrasi pertanahan
7. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dalam rangka pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan Umum
8. Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian penyenggaraan pemerintahan kelurahan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

d. Seksi pelayanan umum

Seksi pelayanan umum mempunyai tugas antara lain :

1. Penyusunan perencanaan kegiatan pelayanan umum kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan pelayanan umum kepada masyarakat.
3. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan umum di lingkungan kelurahan.

4. Penyiapan bahan pemberian perizinan/rekomendasi dan surat keterangan lain yang dikeluarkan oleh kelurahan
 5. Pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 6. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan pelayanan umum.
 7. Pelaksanaan evaluasi dan laporan kegiatan kelurahan bidang pelayanan umum.
 8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh lurah.
- e. Seksi Kesejahteraan sosial

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas antara lain :

1. Menyusun rencana kerja dan melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan sosial.
2. Menyusun rencana kerja dan melaksanakan pembinaan di bidang keagamaan, keluarga bencana, kesehatan dan pendidikan.
3. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya.
4. Menyusun rencana kerja dan membantu kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh.
5. Membantu pelaksanaan pemungutan dana bantuan yang sah.
6. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat.
7. Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh pemimpin.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok : Membantu Lurah melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan perlindungan masyarakat. Fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Keputusan Kepala Daerah dan Peraturan perundang- undangan lainnya di kelurahan.
3. Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat dan anggota LINMAS di Kelurahan.
4. Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab V ini akan menjelaskan terkait uraian dan analisa hasil penelitian tentang evaluasi pengelolaan BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dengan menggunakan indikator yaitu evaluasi pengelolaan badan usaha milik Desa atau BUMDes.

Sebagaimana dijelaskan dalam definisi operasional, penelitian ini menggunakan teori Suharto dalam Apriliana (2016: 10-14) menjelaskan bahwa jenis-jenis evaluasi dapat dilihat melalui beberapa tahapan, secara umum evaluasi dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: Evaluasi Tahap Perencanaan, Evaluasi Pada Tahap Pelaksanaan dan valuasi Pada Tahap Pasca Pelaksanaan.

A. Evaluasi Tahap Perencanaan

Evaluasi terhadap tahap perencanaan menurut Soeharto dalam Apriliana (2016: 10) digunakan untuk memilih dan menentukan skala prioritas terhadap berbagai alternatif dan kemungkinan terhadap cara pencapaian tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Tahapan ini diawali dengan bagaimann tujuan program dari sebuah proram yang menjelaskan terakait harapan dari hasil akhir program.

1. Tujuan Program BUMDes

Tujuan pembentukan sebuah program menjadi tolak ukur keberhasilan program. Tujuan program menjadi acuan atau arah seperti apa sebuah program dibawa kedepannya. tujuan program memberikan dampak terhadap sebuah perencanaan dan pelaksanaan sehingga dapat terarah. BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

didirikan pada bulan Februari tahun 2015 dengan harapan Desa diharuskan mandiri dan harus bisa masuk ke tahap Desa swasembada atau mengelola sendiri sumberdaya sehingga dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan desa. dalam artian desa diwajibkan mengelola dan memanfaatkan sumberdaya untuk selanjutnya kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan awal berdirinya BUMDes maju bersama menurut direktur BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Agunawan yaitu mewadahi setiap unit usaha yang ada di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dan mendapatkan keuntungan untuk selanjutnya menjadi serapan pendapatan asli Desa atau PADes.

a) Hasil Akhir Pembangunan Program

Selanjutnya BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar berlandaskan pada amanat Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 87 menjelaskan dimana BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pada perencanaan program BUMDes, Pemerintah Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar mempunyai beberapa hasil akhir pada pengelolaan BUMDes. Terdapat tiga sektor yaitu sektor sumber daya, sektor pengelolaan dan sektor pemanfaatan.

Pada sektor sumber daya Desa, BUMDes dituntut dapat membuat badan usaha yang diharapkan menjadi rumah usaha yang di kelola Desa kemudian BUMDes dapat menghimpun usaha Desa yang ada di Desa sehingga usaha usaha Desa dapat dikelola dengan baik dan dimanfaatkan segala potensi Desa. Kemudian pada sektor pengelolaannya, BUMDes dibentuk memiliki struktur kepengurusan yang berbeda atau terpisah dengan Desa dimana secara struktural, pengurus BUMDes merupakan orang-orang diluar perangkat Desa. pengelola BUMDes merupakan orang-orang hasil rekrutmen berdasarkan kualifikasi ketentuan kebutuhan kerja. Secara pengelolaan keuangan BUMDes diberikan otonomi seluas luasnya dalam mengurus setiap unit usaha. BUMDes diberikan kebebasan untuk mengelola keuangan sesuai kebutuhan.

Pada sektor pemanfaatan hasil akhir BUMDes bisa memberikan kemakmuran bagi msasyarakat, pemberdayaan masyarakat dan bisa menambah pendapatan untuk Desa. pemanfaatan hasil usaha BUMDes sendiri dikembalikan kepada mayarakat melaui program 30% CSR atau *corporate sosial responsibility*.

b) Tujuan Perencanaan BUMDes

- 1) meningkatkan perekonomian desa;
- 2) mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- 3) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- 4) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- 5) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;

- 6) membuka lapangan kerja;
- 7) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- 8) meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Kemudian menurut Direktur utama BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Agunawan dalam wawancaranya BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar pada awal dibentuk memiliki tujuan yaitu :

“Meningkatkan perekonomian masyarakat dan membangun Desa menjadi lebih mandiri dan Maju, kami memiliki Rencana kedepan unit usaha dapat berkembang, berjalan dengan baik, tidak rugi, menghasilkan profit, sehingga masyarakat bisa berkecimpung disitu” (wawancara 26 Oktober 2018)

Sedangkan dalam peraturan Desa Sei Simpang Dua Nomor 141 Tahun 2015 tentang pembentukan badan usaha milik Desa pasal 5 menyatakan tujuan pembentukan BUMDes yaitu :

- 1) mendorong perkembangan perekonomian masyarakat desa
- 2) meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- 3) meningkatkan berkembang usaha mikro sektor informal dan

2. Kegiatan Pendukung Program

Tahun 2017 Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar mendapat alokasi dana Desa yaitu sebesar Rp 852.255.200 dimana 30% dana Desa dialokasikan untuk penambahan modal badan usaha milik Desa. kegiatan penunjang program BUMDes tersusun dalam beberapa kegiatan

yang telah disusun dalam program kerja BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar 2017, pertama kegiatan peningkatan ekonomi masuarakat, kedua kegiatan saran prasarana ketiga bagian program.

Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat meliputi kegiatan Simpan Pinjam modal usaha. Kegiatan saran prasarana atau dalam hal ini adalah mendirikan kampung Wifi. Kegiatan program yaitu penyediaan sarana produksi pertanian, mengingat di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sebagian besar masyarakatnya merupakan petani.

Kegiatan BUMDes tersusun dalam Tabel 3.1 Program kerja BUMDes Hanyukupi tahun 2017

Tabel V.1. Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

No	Nama Program	Kegiatan	Keterangan
1	Simpan Pinjam	Memberikan pinjaman modal usaha pada masyarakat	berjalan
2	Usaha Air Mineral	Usaha air minum isi ulang yang di kelola masyarakat	sudah tidak berjalan
3	Perkreditan Furniture dan Elektronik	Tempat masyarakat dapat membeli furniture dan elektronik secara kredit	Sudah tidak berjalan
4	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi)	Toko penyedia bahan dan alat pertanian	Rencana
5	Pengelolaan Pasar Desa	Tempat jual beli masyarakat desa	berjalan
6	Penyebaran WiFi	Penyediaan jaringan internet secara gratis oleh pemerintah desa	berjalan
7	Pertamini	Tempat penjualan minyak	berjalan

Sumber :Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir, 2019

Hasil program kerja BUMDes Maju BersamaDesa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar tahun 2018 diatas hampir 85% program sudah terlaksana seperti Simpan Pinjam, Penyediaan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi) pengelolaan pasar Desa, penyebaran wifi, dan Pertamina Desa, kemudian pelaporan hasil kinerja keuangan melalui laporan pertanggungjawaban dari data diatas dapat dilihat bahwa hasil program kerja ini sudah sesuai dengan program kerja bahwasanya sudah dilakukan dengan baik.

Selanjutnya pada pertengahan 2018 BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar melau pemerintah Desa Ponjong yang bekerja sama pihak kopras berhasl memberikan pinjaman modal usaha tanpa anggunan yang bersar pada masyarakat. Program ini menghasilkan tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha baru oleh masyarakat Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Menurut Kaur Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar program telah berjalan sangat efektif.

“Banyak masyarakat desa yang mengembangkan usahanya dengan meminjam modla usaha dari koperasi simpan Pinjam BUMDes Maju bersama, dari usahanya kecil menjadi besar, namun ada juga yang usahanya begitu-begitu saja, semua tergantung masyarakat nya sendiri, kalau dia ingin memajukan ushakanya, maka dia akan berusaha sebaik mungkin” (wawancara 30 Oktober 2019)

Kemudian menurut Agunawan dalam wawancaranya menjelaskan

“adanya program simpan pinjam ini sangat membantu peningkatan perekonomian masyarakat desa kami, karna kami disini meminjamkan modal usaha tanpa anggunan, namun kami akan melihat terlebih dahulu jenis usaha yang akan dikembangkan oleh masyarakat yang meminjam tersebut” (wawancara 31 Oktober 2019) .

Sedangkan Masyarakat desa juga merasa sangat terbantu dengan adanya program Simpan Pinjam dari BUMdes Maju Bersama, Sebagaimana dikatakan ibu Minah sebagai nasabah dari Simpan Pinjam BUMdes Maju Bersama, beliau mengatakan bahwa,

“wah kami sangat terbantu dengan program simpan pinjam ini kami jadi bisa mengembangkan usaha kami, bisa pinjam dengan bunga rendah seperti pinjaman untuk rakyat kecil” (wawancara 20 Oktober 2019) .

Berdasarkan hasil diatas bahwa dengan adanya program kerja pendukung BUMDes dan kerjasama dengan Intansi terkait. Memberikan hasil kepada BUMDes bahwa pembangunan BUMDes tidak hanya begitu saja berdiri butuh waktu, tenaga dan usaha. Sehingga BUMDes Maju BersamaDesa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dapat semakin maju dan berkembang.

B. Evaluasi Tahap Pelaksanaan

1. Efisiensi, efektif dan konsisten

Guna mengefisiensi dan mengefektifkan pembangunan BUMDes Kementrian Desa (2016: 1) membuat kebijakan terkait ke efektifitas dan efisiensi pembangunan BUMDes yaitu Desa perlu mendorong *stakeholder* pembangunan yakni Pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemerintah berperan memberikan pelayanan publik, mengarahkan, memfasilitasi kegiatan pembangunan dan memberikan peluang kepada swasta dan masyarakat

Kemudian intnasi pemerintah lainnya dan pihak swasta berperan memberikan pelayanan privat sebagai pelaku utama dalam pengembangan usaha,

pertumbuhan ekonomi wilayah dan penciptaan lapangan kerja dan terakhir adalah masyarakat sebagai pemeran utama dalam proses pembangunan, namun perlu pengembangan dan penguatan kelembagaan

a) Efisien

Pengelolaan BUMDes Maju BersamaDesa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar mengedepankan efisiensi baik itu secara waktu, biaya dan tenaga. Sehingga BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar mampu dikelola dengan tepat, cermat, berdaya guna dan bertepatan guna. Hal ini dibuktikan pengelola BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dengan memanfaatkan potensi mata pencarian masyarakat sebagai petani maka pihak BUMDes Maju Bersama menyediakan Sarana Produksi Pertanian (Saprodi). Sehingga para petani tidak mengalami kesulitan dalam mencari sarana produksi pertaniannya.

Kemudian dari segi pengelola. Pada tahun 2015 berjumlah 7 orang pengelola yang mengelola satu unit usaha. Tetapi, pada tahun 2018 dengan jumlah empat(4) unit usaha BUMDes Maju BersamaDesa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar hanya menambah 12 orang pengelola sehingga pada tahun 2018 pengelola BUMDes menjadi 19 orang. Hal ini dinilai sangat efisien dalam memanfaatkan jumlah pendapatan BUMDes yang masih kecil.

Selain itu BUMDes Maju BersamaDesa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar juga menghimpun unit usaha masyarakat dengan menyediakan lahan untuk masyarakat berjualan barang dagangannya seperti

warung makan, penjula air, penjual bakso, angkringan dan warung kecil lainnya. Hal ini dirasa sangat bermanfaat dalam memberikan pelayanan untuk pengunjung BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten kampar. Hal ini seperti yang disampaikan Ibu minah perwakilan masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, beliau mengatakan bahwa,

“sudah banyak unit usaha kami di desa, jadi kebutuhan kami sudah bisa dipenuho di dalam desa kami sendiri, sehingga tidak perlu capek ke kota untuk belanja.” (wawancara 20 Oktober 2019) .

Berikut data usaha yang ada disekitar unit usaha Bumdes Maju BersamaDesa Sei Simpang dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Tabel V.2 Daftar Usaha Disekitar Bumdes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar

No	Jenis Usaha	Jumlah
1	Usaha warung sembako	2
2	Usaha warung Angkringan	1
3	Usaha makanan jajanan	4
4	Usaha minuman	2
5	Usaha warung makan	2

Sumber : Bumdes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, 2019

Adanya usaha masyarakat ini juga mempermudah aktivitas masyarakat, tanpa harus jauh ke pusat Kota untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b) Efektif

Pengelolaan BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar juga menerapkan efektifitas dalam mengelola BUMDes yaitu dimana masing-masing unit usaha BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten

Kampar memiliki SOP atau standar operasional. Juga pada sub unit pekerjaan ada bidangnya masing masing yang sudah memiliki standar kualitas. Namun menurut Agunawan.

“SOPnya ga tertulis dulu sempat ada tetapi karena sudah menjadi kebiasaan jadi sudah tidak dipakai. ngalir sendiri karena tidak ada sop tertulisnya. Walaupun kita masih memakai sesuai standar kita” (wawancara 30 Oktober 2019)

BUMDes Maju BersamaDesa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dalam menerapkan efektifitas pengelolaan juga dengan menerapkan sistem *Floating Rolling* pegawai atau penempatan dan pemindahan pegawai sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dibutuhkan setiap unit usaha BUMDes agar memiliki karyawan dan team organisasi masing masing.

c) Konsisten

Untuk menjaga konsisten pengelola BUMDes Maju BersamaDesa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar memberikan *reward* atau penghargaan kepada organisasi pengelola jadi selain intensif atau gaji pokok ada dana tambahan sesuai pekerjaan. Diberikanya penghargaan tersebut dapat berbentuk imbalan atau penghargaan lainnya.

BUMDesMaju BersamaDesa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar juga guna menjunjung konsisten selalu diadakan rapat rutin membahas terkait evaluasi, diskusi, motivasi, bonus dan lain-lain sesuai kebutuhan situasi keadaan BUMDes. Sehingga dapat menjaga keberlangsungan karyawan. Pada pelaksanaannya BUMDes juga membuat sebuah arisan antar pengurus dan pegawai yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Namun menurut Agunawan

“pihak BUMDes memberikan pengurus imbalan berupa gaji sehingga para pengurus dapat meningkatkan kinerjanya guna meningkatkan keberkasilan BUMDes, dengan pembverian gaji ini secara otomatis meningkatkan perekonomian pengurus BUMDes” (wawancara 29 Maret 2018).

2. Pengorganisasian BUMDes

Pengorganisasin BUMDes Maju BersamaDesa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar merupakan usaha Desa dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Pengorganisasian BUMDes tersusun dari 7 orang pengurus inti.

BUMDes Maju BersamaDesa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar memiliki Struktur

Komisaris	: Solihin
Pengawas	: Hariyadi
Direktur	: Agunawan
Kepala Unit Simpan Pinjam	: Sindu Wibisono
Staff Keuangan	: Sri Rahnmayati
Staff Administrasi	: Beti Nuryatik
Staff Analisis	: Maryati

BUMDes Maju Bersama pada tahun 2017 memiliki tiga unit usaha masing masing unit usaha memiliki struktur dan pengorganisasiannya sendiri. Hal tersebut dikarenakan unit usaha harus dikelola sendiri supaya lebih terfokus. Ketiga unit usaha tersebut adalah :

1) Simpan Pinjam

Unit Simpan pinjam memiliki 8 struktur kerja dan 11 orang karyawan yaitu Penanggungjawab 1, koordinator Organisasi pengelola 1, Ketua 1, Wakil 1, Staff administrasi 1, Analisis kredit 2, Tellet 3, dan Bagian pelayanan 2 orang.

2) Penyedia Saran produksi Pertanian

Unit Poktan memiliki 6 struktur kerja dan 9 orang karyawan yaitu Penanggungjawab 1, koordinator Organisasi pengelola 1, penjaga malam 1, kebersihan 3, Perawat alat 1, administrasi 2 orang.

3) Penyedia Wifi

Unit Penyedia Wifi memiliki 4 struktur kerja dan 4 orang karyawan yaitu Penanggungjawab 1, koordinator Lapangan 1, pengawas 1, dan Perawat alat 1 orang.

4) Pertamina

Unit Pertamina memiliki 4 struktur kerja dan 5 orang karyawan yaitu Penanggungjawab 1, koordinator Organisasi pengelola 1, petugas pengisian 2 orang dan kasir 1 orang.

3. Ketenagakerjaan

Peran dan sistem tenaga kerja BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar pada awalnya menggunakan sistem penunjukan yaitu hanya siapa yang mau. Tetapi dalam pelaksanaannya walaupun ditunjuk tetap tidak ada yang mau mengisi jabatan atau bekerja di BUMDes. Menurut Agunawan bahwa

“dulu karena BUMDes belum ada uangnya jadi tidak mau berekerja di BUMDes malah beranggapan bahwa BUMDes tidak akan berjalan” (wawancara 30 Oktober 2019)

Kemudian seiring berjalan dan semakin pesatnya pertumbuhan BUMDes sistem rekrutmen dilakukan melalui team atau orang diluar BUMDes dalam kata lain dipihak ketigakan dalam artian BUMDes hanya memberi spesifikasi dan kualifikasi tentang calon dan jabatan yang diperlukan. Proses rekrutmen diserahkan kepada BPD, Perangkat Desa dan Kepala Desa, hal ini dilakukan guna menjaga netralitas dalam tubuh BUMDes sendiri sehingga dapat berjalan sesuai prinsip pengelolaan BUMDes.

4. Peraturan Perundangan

Sejak berdirinya pada tahun 2015 BUMDes Maju BersamaDesa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sudah mendapat *legal standing* yaitu Peraturan Desa Sei Simpang Dua Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. selain itu Kabupaten Kampar juga membuat sebuah Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. yang sebelumnya sudah dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dari peraturan berikut Peraturan Desa Ponjong Sei Simpang Dua Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa. menjadi hal

mendasar karena segala sesuatu terkait BUMDes dikontrol dan mengikuti arah dari Desa.

C. Evaluasi Tahap Pasca Pelaksanaan

1. Hasil Pengelolaan BUMDes

Hasil pengelolaan dari suatu program adalah berjalan dan terukurnya capaian suatu program sehingga dapat memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar memiliki hasil pengelolaan kedalam tiga objek yaitu:

a) Terhadap Desa

Tidak dipungkiri adanya sebuah inovasi baru akan memberi dampak terhadap segala lini masyarakat. Pembentukan badan usaha milik Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sudah pasti memberikan perubahan yang signifikan baik itu dari segi kebijakan lingkungan, ekonomi dan lain lain.

Pengoptimalisasian aset Desa juga memberikan dampak terhadap desa dimana secara fisik dari segala hasil yang didapat semua aset BUMDes adalah aset Desa. Dalam hal ini BUMDes

- 1) Kantor yang dijadikan unit usaha Simpan Pinjam
- 2) Alat Wifi.
- 3) Tanah di untuk lahan pertamini
- 4) Lahan untuk penyimpanan alat produksi pertanian
- 5) Gedung Serbaguna dan kantor BUMDes di samping lahan Pertamina.

Secara langsung maupun tidak langsung adanya pengunjung BUMDes akan memberi dampak yang sangat signifikan. Secara ekonomi usaha masyarakat, penyedia barang kebutuhan seperti penjual sembako, makanan, minuman, bahan bakar kendaraan, oleh oleh dan souvenir sangat mendorong pendapatan masyarakat

b) Pendapatan Desa

Menurut Afdi selaku Kaur Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar adanya BUMDes perekonomian masyarakat semakin baik, dan masyarakat mengalami kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan akan sarana pekerjaan mereka sebagai petani.

Kemudian pembagian dana sisa hasil usaha atau SHU untuk Desa dari BUMDes mencapai 30%. Hal ini menjadikan secara ekonomi BUMDes sangat memberi peran dalam peningkatan ekonomi Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Data dari tahun 2013 mencatat bahwa pendapatan BUMDes yaitu sebagai berikut :

Tabel V.3. Data Pendapatan SHU BUMDes

No	Tahun	Nominal
1	2015	63.315.680,00
2	2016	91.422.450,00
3	2017	93.008.000,00
4	2018	98.433.000,00

Sumber : Laporan pertanggungjawaban Keuangan BUMDes Maju bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, 2019

Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan

Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Maka pengalokasian SHU BUMDesa diperuntukan kedalam beberapa hal yaitu tertuang dalam data alokasi dana Sisa hasil usaha BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Tabel V.4. Data Alokasi SHU BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

No	Alokasi Sisa Hasil Usaha	Presentase
1	Penambahan Modal BUMDesa	40 %
2	Kas Desa sebagai Pendapatan Asli Desa (APBDesa)	30 %
3	Tunjangan/Penghasilan Penasehat, Badan Pengawas dan Direksi BUMDesa	15 %
4	Peningkatan SDM Pengurus dan Pengelola Usaha	5 %
5	Dana Sosial	2,5 %
6	Dana Cadangan	7,5 %

Sumber : Laporan pertanggungjawaban Keuangan BUMDes Maju bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, 2019

Keterangan alokasi yaitu dana penambahan modal BUMDesa sebesar 40% akan dipergunakan sebagai biaya merencanakan program kerja BUMDes. Untuk alokasi dana ke Desa sebesar 30% masuk menjadi PADes dan dicantumkan dalam APBDes. Alokasi dana tunjangan atau penghasilan pengelola BUMDes terdiri dari penasehat, badan pengawas dan direksi BUMDesa sebesar 15% dikelola oleh BUMDes bersama penasehat dan badan pegawai. Untuk alokasi dana peningkatan SDM pengurus dan pengelola usaha sebesar 5% dikelola oleh BUMDes. Untuk alokasi dana sosial sebesar 2,5% direalisasikan untuk bantuan kepada warga miskin di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dengan penunjukan diserahkan kepada pemerintah dan alokasi dana cadangan sebesar 7,5% dipergunakan untuk penyusunan laporan

pertanggungjawaban dan pelaksanaan musyawarah desa atau LPJ BUMDes. Kemudian dalam pelaksanaannya dana SHU didapat dari unit unit usaha, dimana SHU ini di dapat setelah mengurangi kebutuhan operasional sehingga didapat pendapatan bersih. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban BUMDes.

c) Masyarakat dan Ekonomi Masyarakat

Ekonomi masyarakat secara sosial dengan banyaknya unit usaha baru yang dikembangkan dan dibangun oleh masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar ikut mendukung perekonomian. dimana banyaknya usaha masyarakat yang bersimbiosis mutualisme dengan adanya BUMDes. Kemudian dengan banyaknya unit usaha baru tersebut secara sosial mengubah gaya hidup masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar harus ke kota untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu minah masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar, beliau mengatakan, han, sekarang segala kebutuhan bisa mereka temui di Desanya sendiri.

“ya betul sekali mas, dengana adanya BUMDes ini, kami masyarakat secara ekonomi sangat terbantu, makanya kami akan memajukan BUMDes kami ini, banyak keuntungan yang kami dapat, seperti pemasukan kami bertambah, ada lowongan kerja baru untuk anak dan suami. Sangat membantu lah pokoknya” (wawancara 20 Oktober 2019) .

Secara perekonomian semakin meningkatnya pendapatan masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Menurut Direktur BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Agunawan menjelaskan

“Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar perlahan memiliki perekonomian yang semakin baik, masyarakat dapat mandiri dan mengembangkan usahanya dengan baik” (wawancara 30 Oktober 2019).

2. Effect dan impact Program

Dampak adanya program BUMDes ini secara ekonomi yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa mengurangi nilai nilai yang sudah ada sehingga sistem masyarakat yang dulu berjalan tidak terkikis oleh adanya eksternalisasi dari BUMDes.

Adanya BUMDes ini semakin menambah kakuatan karifan lokal Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dimana BUMDes berjalan beriringan dengan kebiasaan masyarakat. Masyarakat semakin mandiri dan dapat bersaing dengan masyarakat di perkotaan.

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi pengelolaan ini terbagi kepada tiga tahap yaitu evaluasi tahap perencanaan, evaluasi tahap pelaksanaan dan evaluasi tahap pasca pelaksanaan. Ketiga evaluasi itu akan memberikan hasil dimana sebuah program diukur sesuai tahapan. Sehingga program akan terukur sejauh mana tingkat keberhasilannya. Sehingga dapat diberikan kesimpulan bahwa pada:

Evaluasi tahap perencanaan BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar Kiri Hilir dimulai dengan perencanaan hasil akhir dimana hasil akhir tersebut dibuat berdasarkan fasilitas atau alat untuk merencanakan, pada evaluasi tahap perencanaan BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten

Kampar memiliki perencanaan bahwa dengan adanya BUMDes ini dapat memberikan hasil yang sangat besar untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian tujuan perencanaan BUMDes Maju Bersama Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar memiliki rencana membuat semua unit usaha ataupun potensi Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar dapat dikelola oleh BUMDes sehingga pada akhir dapat dilihat bahwa tujuan kesejahteraan masyarakat sudah terwujud melalui ekonomi masyarakat.

Program pendukung BUMDes terdiri dari beberapa program kerja yang diawali dengan merefitalisasi Sumber Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar menjadi unit usaha. Kemudian seiring berjalannya waktu unit usaha lain didorong dengan semangat kebutuhan masyarakat maka lahirlah unit usaha yang saling berkesinambungan dan berkebutuhan.

Pada Evaluasi tahap Pelaksanaan peneliti mengukur efektif, efisien dan konsisten BUMDes dalam menjalankan program dimana didorong melalui sumberdaya manusia atau karyawan. Terdapat kegiatan ataupun pelatihan guna mendorong semangat kerja dan memunculkan inovasi baru baik melalui kerjasama ataupun memanfaatkan potensi Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.

Dari segi pengorganisasian setiap unit usaha memiliki peran dan struktur masing masing sehingga terpisah antara pemerintah Desa dan pengurus BUMDes. Selain itu dari segi keuangan pemerintah Desa hanya memberikan modal sehingga BUMDes diberikan otonomi dalam mengelola keuangannya. Evaluasi tahap pasca pengelolaan hadirnya BUMDes memberikan pengaruh yang sangat signifikan

dimana dari tahun 2018 mendapat SHU sebesar 200 juta rupiah, dengan adanya BUMDes secara sosial masyarakat sangat terpengaruh karena adanya wisatawan memunculkan mindset bahwa BUMDes masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar harus membuka diri.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tentang Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan Studi kasus Badan Usaha Milik Desa Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi Tahap Perencanaan

Mewadahi setiap unit usaha yang ada di Desa Ponjong baik berupa jasa ataupun barang dan mendapatkan keuntungan dari unit usaha sebanyak banyaknya sehingga dapat menjadi serapan keuangan Desa berupa pendapatan asli Desa atau PADes

1) Hasil Akhir Program

Empat sektor Perencanaan hasil akhir BUMDes Maju Bersama yaitu Simpan Pinjam, Pertamina, Pengelolaan Pasar, dan Penyedia alat pertanian.

2) Tujuan Perencanaan BUMDes

- a) mendorong perkembangan perekonomian masyarakat Desa
- b) meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif masyarakat Desa yang berpenghasilan rendah.
- c) Meningkatkan berkembang usaha mikro sektor informal dan
- d) Meningkatkan pendapatan asli Desa.

2. Evaluasi Tahap Pelaksanaan

Dilakukan dengan merencanakan kembali program-program yang belum berjalan dan mengawasi serta mempertahankan program yang sudah berjalan dengan melihat keefektifan program di dalam masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Pelaksanaan program BUMDes dilakukn dengan mengikutsertakan masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar menjadi anggota dan pengurus BUMDes, agar masyarakat secara gotong royong dapat mengembangkan BUMDes Maju Bersama.

3. Evaluasi Pasca Pelaksanaan

Memberi perubahan secara ekonomi usaha masyarakat penyedia barang kebutuhan seperti penjual sembako, makanan, minuman, bahan bakar kendaraan, oleh oleh dan souvenir sangat mendorong pendapatan masyarakat kemudian membuka lapangan kerja bagi masyarakat Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar. Ekonomi masyarakat secara sosial dengan banyak masuknya pertumbuhan usaha masyarakat. dimana banyaknya usaha masyarakat yang bersimbiosis mutualisme dengan adanya BUMDes. Efek positif adanya program BUMDes ini secara ekonomi yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat tanpa mengurangi nilai nilai yang sudah ada sehingga sistem masyarakat yang dulu masih berjalan. Adanya BUMDes ini semakin menambah kekuatan karifan lokal Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri

Hilir Kabupaten Kampar BUMDes Berjalan beriringan dengan kebiasaan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan, maka terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. BUMDes harus masuk terhadap sektor ekonomi masyarakat dalam bentuk pemberdayaan atau pemasaran produk hasil olahan atau hasil pertanian di Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar diharapkan untuk transparansi perihal PADes dari BUMDes sebesar 30% yang selanjutnya dikelola untuk masyarakat.
3. Pembentukan unit usaha baru harus bisa menyerap sebanyak banyaknya tenaga kerja dari Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar sehingga remaja Desa Sei Simpang Dua Kecamatan Kampar Kiri Hilir Kabupaten Kampar tidak hanya pergi ke kota besar tetapi dapat diberdayakan.
4. Pengelola BUMDes harus mendokumentasikan segala bentuk arsip kegiatan, pendapatan, keuangan dan hal lainnya sehingga dapat menjadi acuan atau referensi Desa yang lain

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

Abdul Wahab, Solichin.2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta.

Budi Winarno. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Bardach. 2008. *Public Policy Analysis: An Introduction. Fourth Edition*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall; Chapter 1.

Nugroho D, Riant. 2012. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Gramedia

Noor. M. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Yogyakarta; Interpena

Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2009. *Manajemen Publik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia

Widoyoko, E. P., 2014, *Evaluasi Program Pembelajaran (Instructional Program Evaluation)*. Tanpa Kota

Yusuf, M. 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. Web: Data keuangan BUMD

Zulkarnain Ridlwan, 2013. *Payung Hukum Pembentukan BUMDes, Fiat Justitia*

Jurnal dan Skripsi :

Anggraeni M. R. R. S. 2016. *Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan Studi Pada BUMDes Di Gunungkidul, Yogyakarta*. Yogyakarta. Vol.28 (2): 155-167, 2016.

Apriliana, 2016, *Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Simpan Pinjam Perempuan (Spp) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat (Studi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)*. Lampung : Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung Bandar Lampung

Nugrahaningsih. P. *Falikhatus dan Winarna. J. 2016. Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Des) Menuju Desa Mandiri.* Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 16 No. 1, Februari 2016: 37 - 45

Putera, P. R., 2012, *Evaluasi Kebijakan Trans Pakuan Di Kota Bogor*, Bogor : Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara Depok

Windarnovi, H. W. 2015. *Analisis Penyaluran Kredit Usaha Kecil Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Makmur, Desa. Kota Baru, Kec. Kunto Darussalam, Kab. Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).Riau Jurnal Ilmu Hukum Vol 7, No.3(September-Desember, 2013), hlm. 356

Dokumentasi :

Undang-undang: Peraturan Desa Ponjong nomor 6 tahun 2010 tentang pembentukan badan usaha milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Undang-undang No 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah Undang-undang No 6 tahun 2014 Tentang Desa